PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Sabtu Tanggal: 10 Agustus 2019 Halaman: 1

Angkat Tangan Kelola Sampah

Minim, Anggaran Pemprov Tak Sanggup Tangani TPST Piyungan

JOGJA, *Radar Jogja* - Penanganan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan pada 2020, tampaknya, tidak jauh berbeda. Tak jauh lebih baik dibanding 2019. Sebab, anggaran yang dialokasikan pemprov pada tahun depan masih minim. Maksimal hanya di angka Rp 10 miliar.

"Kenaikannya hanya sekitar 10-20 persen (dari anggaran Rp 8,7 miliar pada 2019, Red)," jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ Sutarto di kantornya kemarin (9/8).

Sutarto tak menampik, anggaran yang dialokasikan pemprov belum mampu menuntaskan penanganan sampah di TPST. Meski, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Perhubungan DIJ juga telah ikut *cawe-cawe*.

▸ Baca **Angkat**... Hal 7

MASIH MINIM

Alokasi anggaran penanganan sampah TPST Piyungan.

2018	2019
Rp 8,7 miliar	Rp 10 miliar

- Belum mampu menuntaskan penanganan sampah di TPST Piyungan.

Kenaikan alokasi dana 2018 dengan 2019 hanya sekitar **10-20 persen**

SKENARIO PEMPROV

PEMBANGUNAN TALUT

- Membangun 400-600 talut di TPST Piyungan.
- Kontruksi talut itu dibangun untuk menyiasati kapasitas TPST yang telah *overload*.
- Pembangunan ratusan talut ini hanya sebagai solusi sementara.

TATA KELOLA BARU

- Salah satunya dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
- Kerja sama pemanfaatan tumpukan sampah itu terealisasi pada 2022.

2021 diproyeksikan tahap lelang kontruksi.

GRAFIS: HENDRI KARTUN/RADAR JOGJA

Sambungan dari hal 1

Plus Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Jogja yang memanfaatkan TPST.

Kendati begitu, pemprov telah menyiapkan beberapa skenario lain pembenahan TPST yang beroperasi pada 1995 itu. Di antaranya dengan membangun 400-600 talut di TPST Piyungan. Kontruksi talut itu dibangun untuk menyiasati kapasitas TPST yang telah *overload*.

Hanya, Sutarto menekankan, pembangunan ratusan talut ini hanya sebagai solusi sementara.

"Yang dibutuhkan adalah proses pengurangan sampah dengan cara-cara tertentu," ujarnya.

Karena itu, Sutarto menegaskan, perlu tata kelola baru dalam menangani tumpukan sampah di TPST Piyungan. Salah satunya dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam skema KPBU, kata Sutarto, pemprov menggandeng pihak swasta. Pihak swasta inilah yang akan menangani tumpukan sampah.

"Teknologinya masih belum diketahui. Apakah sampah tersebut untuk energi atau apa," ujarnya.

Sutarto menargetkan, kerja sama pemanfaatan tumpukan sampah itu terealisasi pada 2022. Sebab, pada 2021 diproyeksikan telah memasuki tahap lelang kontruksi.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi C DPRD DIJ Anton Prabu mengakui, pengelolaan TPST Piyungan memang sangat pelik. Diperlukan terobosan baru. Di antaranya dengan melalui skema KPBU. Lantaran luas lahan di TPST Piyungan terbatas.

Meski begitu, Anton berharap badan usaha pengelola TPST Piyungan memiliki kredibilitas dalam menangani sampah. Badan usaha itu juga harus memiliki komitmen dalam menangani persoalan sampah di TPST Piyungan.

"Namanay KPBU, *kan*, pemprov tidak melepas begitu saja. Masih ada aset-aset yang dimiliki provinsi," ingatnya.

Sekretaris Provinsi DIJ Gatot Saptadi menegaskan, skema KPBU sebagai solusi jitu. Sebab, anggaran pemprov hanya mampu mengelola sampah melalui teknis. Seperti yang telah berjalan bertahun-tahun.

"Kondisinya *overload*, sudah semestinya ada teknologi yang dipakai untuk mengelola sampah. Apakah jadi energi atau kompos itu yang akan disiapkan," katanya. **(bhn/zam/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005